

[SIARAN PERS]

Nomor: 051/RILIS/BKN/II/2019

Lanjutan Aksi P2K BKN: Database Potensi dan Kompetensi Pejabat Pengawas Papua dan Papua Barat Jadi Target BKN

Realisasi program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Tahun 2018 di Provinsi Papua dan Papua Barat menuai apresiasi dari sejumlah ASN di kedua wilayah tersebut. Berdasarkan hasil survei kepuasan Program P2K BKN terhadap para ASN di 21 Kabupaten/Kota di Wilayah Papua, sebanyak 85% menyatakan puas. Sementara di Papua Barat, para ASN di 13 Kabupaten/Kota, sebanyak 84% juga menyatakan puas.

Dengan *tagline* **“Menjangkau Untuk Melayani”** pada tahun 2019 BKN akan kembali melanjutkan aksi P2K dengan agenda pemetaan SDM ASN untuk menjangkau potensi dan kompetensi Pejabat Pengawas sebagai pejabat pelaksana pada level pelayanan dasar di Papua dan Papua Barat. Terhitung sebanyak 42 personil Asesor dari Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional BKN, serta melibatkan 94 asesor dari lintas instansi pusat dan daerah diterjunkan secara bertahap. Tim akan dibagi menjadi 2 (dua) tahap, sejak Februari hingga Maret 2019. Lokasi yang akan dijangkau sedikitnya 17 (tujuh belas) titik, yang tersebar di Provinsi Papua dan Papua Barat. Lanjutan program ini tidak terlepas dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Secara konkret P2K BKN akan melakukan pemetaan potensi dan kompetensi lewat metode *assessment* oleh tim asesor BKN dan instansi pusat/daerah. Hasil *assessment* ini akan direalisasikan melalui *database* potensi dan kompetensi ASN pada level Pengawas di kedua wilayah tersebut. *Database* yang terbangun akan digunakan sebagai rujukan utama pengembangan karier ASN level Pengawas di Papua dan Papua Barat.

Selain untuk membangun *database* potensi dan kompetensi yang akurat dan kredibel, *outcome* pemetaan Pejabat Pengawas di Papua dan Papua Barat juga dilakukan untuk menjaring kandidat yang berpotensi untuk mengisi jabatan strategis di birokrasi. Dengan adanya *database* kompetensi dan potensi Pejabat Pengawas, proses pengisian jabatan Administrator di Papua dan Papua dapat berjalan tanpa alur yang panjang dan seleksi secara objektif.

Jakarta, 11 Februari 2019
Kepala Biro Humas BKN
Ttd
Mohammad Ridwan